

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PENGESAHAN .....	
ABSTRAKSI.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	20
1.7 Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB 2. PENJUALAN KAPLING HUTAN DENGAN STATUS HAK MILIK OLEH BADAN HUKUM SWASTA KEPADA MASYARAKAT</b>	

2.1 Penjelasan Umum Hukum Agraria.....	23
2.2 Hukum Kehutanan Dan Hutan .....	26
2.3 Status Hak Atas Tanah dan Status Hak Milik Atas Tanah.....	32
2.4 Hak Guna Usaha.....	37
2.5 Peralihan Hak Atas Tanah.....	38
2.6 Penjualan Kapling Hutan Oleh PT.X .....	45
2.7 Analisa Kasus .....	53
 <b>BAB 3 PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK</b>	
3.1 Pengertian Sertipikat .....	57
3.2 Isi dan Bagian Sertipikat .....	59
3.3 Penerbitan Sertipikat .....	60
3.4 Penertiban Sertipikat Hak Milik Atas Kapling Hutan PT.X .....	64
3.5 Analisa Kasus .....	65
 <b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	117
4.2 Saran .....	119
DAFTAR BACAAN .....	

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dan Amandemennya.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 197 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Nomor 86 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4374)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 24/1997